



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun Perubahan standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa perubahan dilaksanakan diantaranya tentang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan honorarium Tim Pelaksana kegiatan yang belum diatur pada Standar Belanja sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 5

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SÚJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 438

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 27
 TAHUN : 2019

I. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Kegiatan

A. Pengelola Anggaran/Barang pada OPD

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengguna Anggaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 1.000.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 1.750.000
3	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 2.000.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 2.250.000
5	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	O/B	Rp. 2.750.000
6	Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 3.000.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 3.500.000

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 750.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000
3	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 1.350.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 2.000.000
5	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	O/B	Rp. 2.500.000
6	Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 3.000.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 3.250.000

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan-OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 350.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 750.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 850.000
5	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000
6	Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 1.250.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000

4. Pejabat Pembuat Komitmen mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 850.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 1.250.000
3	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 2.000.000
5	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	O/B	Rp. 2.500.000
6	Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 3.000.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 3.250.000

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah seluruh pagu anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

No	PPTK	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 350.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 750.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 850.000
5	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000
6	Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 1.250.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000

6. Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran

No	Bendahara Pengeluaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 500.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 600.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 700.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 900.000
8	Bendahara Pengeluaran SKPKD diatas 100 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000

b. Bendahara Penerimaan

No	Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 450.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 500.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 700.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

8. Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 300.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 450.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000

b. Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

9. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola

No	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

b. Pembantu Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola

No	Pembantu Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 250.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 350.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000

10. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, serta Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna pada OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang

No	Pengurus Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Pengguna DisdikBUD, Dinkes, PU dan PP, Sekretariat Daerah	O/B	Rp. 750.000
2	Pengurus Barang Pengguna OPD selain yang tertera di nomor 1	O/B	Rp. 500.000
3	Pembantu Pengurus Barang Pengguna DisdikBUD, Dinkes, PUPR dan PP, Sekretariat Daerah	O/B	Rp. 500.000
4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna OPD selain yang tertera di nomor 3	O/B	Rp. 300.000

b. Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna

No	Penyimpan Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Pembantu di RSUD	O/B	Rp. 750.000
2	Pengurus Barang Pembantu di UPT Instalasi Farmasi Dinkes	O/B	Rp. 500.000
3	Pengurus Barang Pembantu di SMPN, Puskes, UPTD	O/B	Rp. 200.000
4	Pengurus Barang Pembantu di SDN, Pustu dan Kelurahan	O/B	Rp. 150.000

c. Tim Peneliti Kontrak

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Ketua	O/B	Rp. 500.000
2	Sekretaris	O/B	Rp. 350.000
3	Anggota	O/B	Rp. 250.000

d. Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Ketua	O/B	Rp. 750.000
2	Sekretaris	O/B	Rp. 500.000
3	Anggota	O/B	Rp. 350.000

B. Belanja Operasional, Tambahan Penghasilan, Honor Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	a. Bupati	O/B	Rp. 25.000.000
	b. Wakil Bupati	O/B	Rp. 20.000.000
2	a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Struktural		
	1. Sekretaris Daerah	O/B	Rp. 15.000.000
	2. Asisten	O/B	Rp. 12.500.000
	3. Staf Ahli Bupati, Inspektur	O/B	Rp. 10.000.000
	4. Kepala Badan/Dinas/Sekwan	O/B	Rp. 6.500.000
	5. Sekretaris dan Irban pada Inspektorat	O/B	Rp. 4.000.000
	6. Ka.Kantor/Ka.Bagian/DirekturRSUD/Sekretaris BPKAD, Bappeda, Bapenda	O/B	Rp. 3.500.000
	7. Sekretaris KPU, Camat, Sekretaris Korpri, Kabid BPKAD, Kabid Bappeda dan Bapenda	O/B	Rp. 3.000.000
	8. Sekretaris Badan/Dinas/Instansi Lainnya	O/B	Rp. 2.500.000
	9. Kasubbag pada Inspektorat	O/B	Rp. 2.000.000
	10. Kabid pada Badan/Dinas/Instansi Lainnya, Sekcam	O/B	Rp. 1.500.000
	11. Kasubbag/Kasubid pada BPKAD, Bapenda dan Bappeda, Kepala UPT pada Bappeda	O/B	Rp. 1.500.000
	12. Kasubbag Protokol pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lurah	O/B	Rp. 1.250.000
	13. Kasubbag Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	O/B	Rp. 1.000.000
	14. Kasi / Kasubbag / Kasubbid / Kasi Kecamatan, Kepala UPT Lainnya	O/B	Rp. 750.000
	15. Ajudan Pimpinan DPRD	O/B	Rp. 750.000
	16. Sekretaris Kelurahan, Kasubag TU UPT Bappeda	O/B	Rp. 600.000
	17. Kaur Kelurahan/Kasubbag Kecamatan/Korpri	O/B	Rp. 500.000
	b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD		
	1. Auditor / JF-P2UPD Madya	O/B	Rp. 4.000.000
	2. Auditor / JF-P2UPD Muda	O/B	Rp. 3.000.000
	3. Auditor / JF-P2UPD Pertama	O/B	Rp. 2.000.000
	c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Kepala Bagian	O/B	Rp. 8.000.000
	b. Kepala Sub Bagian	O/B	Rp. 5.000.000
	c. Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa	O/B	Rp. 5.000.000

1	2	3	4
3.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah a. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Wakil Bupati sebagai Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD e. Kuasa BUD f. Pejabat Eselon IV pada BPKAD selaku SKPKD g. Staf PNS pada BPKAD selaku SKPKD h. Staf Non PNS Pembantu Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 17.500.000 Rp. 15.000.000 Rp. 8.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Non ASN a. Uang Piket Pol PP dan Petugas Damkar dan Penanggulangan Bencana (hanya diberikan untuk yang melaksanakan piket) b. Uang Makan Piket Pol PP (hanya diberikan untuk yang melaksanakan piket) c. Uang Makan Damkar, Penanggulangan Bencana dan Petugas Pengendalian Operasional	O/K O/K O/B	Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 450.000
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi a. Penguji Kendaraan Bermotor b. Analisis Kepegawaian	O/B O/B	Rp. 1.000.000 Rp. 750.000
6	Tunjangan Resiko Tinggi a. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana b. Teknisi Kelistrikan	O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 500.000
7	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Bupati sebagai Penanggungjawab. b. Wakil Bupati Wakil Penanggungjawab c. Ketua d. Wakil Ketua/ Koordinator e. Sekretaris f. Anggota g. Koordinator Sekretariat h. Anggota Sekretariat	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 8.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.000.000
8	Honor Tim Verifikasi Pengelola Hibah dan Bansos a. Pengarah/Pembina b. Penasehat/Penanggungjawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 700.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000 Rp. 500.000

1	2	3	4
9	Honor Tim Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah a. Koordinator Daerah b. Wakil Koordinator c. Ketua d. Sekretaris e. Koordinator Pelaksana f. Pelaksana g. Staf ASN h. Staf Non ASN	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.750.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000 Rp. 300.000
10	Honorarium Tim Penyusunan LKPD, LKPJ dan LKD a. Ketua b. Wakil Ketua / Koordinator c. Sekretaris d. Anggota e. Koordinator Sekretariat f. Anggota Sekretariat	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 4.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.000.000
11	Honorarium Tim Reviuw LKPD, LKPJ, LAKIP dan APBD a. Ketua b. Wakil Ketua/Koordinator c. Sekretaris d. Anggota	O/K O/K O/K O/K	Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000
12	a. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah, Peliputan dan Dokumentasi 1. Kabag Humas dan Protokol 2. Eselon IV pada Bagian Humas dan Protokol 3. Staf ASN 4. Staf Non ASN b. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah 1. Pembina 2. Pengarah 3. Ketua 4. Anggota PNS 5. Anggota Non PNS c. Honorarium Tim Pengawasan/Pendampingan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah d. Honorarium Supir Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah e. Honorarium Tim Pendamping Istri Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah f. Honorarium Supir Istri Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah g. Honorarium Tim Pengawasan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah (yang berasal dari TNI/POLRI)	O/B O/B O/B O/B O/K O/K O/K O/K O/K O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 3.050.000 Rp. 3.050.000 Rp. 3.050.000 Rp. 3.050.000 Rp. 4.500.000

1	2	3	4
19	Honor Tim Kabupaten/Kota Peduli HAM a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
20	Honor Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/Laporan O/Laporan O/Laporan O/Laporan O/Laporan	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
21	Honor Panitia Pelaksana Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
22	Honor Panitia Pelaksana Pekon/Kelurahan Sadar Hukum a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
23	Honor Komunitas Intelijen Daerah a. Dewan Pembina 1. Ketua 2. Anggota b. Dewan Pengurus 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota c. Sekretariat Staf Sekretariat	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 200.000
24	a. Honorarium Tim Saber Pungli 1. Koordinator 2. Ketua Pelaksana 3. Wakil Ketua 4. Ketua Pokja 5. Anggota Pokja b. Sekretariat Saber Pungli 1. Sekretaris 2. Wakil Sekretaris 3. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.300.000

1	2	3	4
19	Honor Tim Kabupaten /Kota Peduli HAM a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
20	Honor Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
21	Honor Panitia Pelaksana Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
22	Honor Panitia Pelaksana Pekon/Kelurahan Sadar Hukum a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000
23	Honor Komunitas Intelijen Daerah a. Dewan Pembina 1. Ketua 2. Anggota b. Dewan Pengurus 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota c. Sekretariat Staf Sekretariat	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 200.000
24	a. Honorarium Tim Saber Pungli 1. Koordinator 2. Ketua Pelaksana 3. Wakil Ketua 4. Ketua Pokja 5. Anggota Pokja b. Sekretariat Saber Pungli 1. Sekretaris 2. Wakil Sekretaris 3. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.300.000

1	2	3	4
	c. Honorarium Majelis Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 1. Pengarah 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota d. Honorarium Sekretariat Tim Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. - Rp. 800.000 Rp. 750.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000 Rp. 500.000
25	Honorarium Tim Reformasi Birokrasi a. Penanggungjawab b. Wakil Penanggungjawab c. Ketua d. Sekretaris e. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000 Rp. 550.000 Rp. 500.000
26	Honorarium Unit Pelayanan Gratifikasi a. Pengarah b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	O/B O/B O/B O/B	Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000 Rp. 550.000
27	Honorarium Tim Monitoring <i>Center For Prevention</i> (MCP) a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B O/B O/B	Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000
28	Honorarium Tim Kelitbangan Inovasi IPTEK a. Penanggungjawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Sekretariat e. Penulis Artikel	Edisi Edisi Edisi Edisi Halaman	Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 125.000 Rp. 50.000
29	Honorarium Tim Penyusunan Terjemahan Alquran ke Bahasa Lampung a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota d. Sekretariat	O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000
30	Honorarium Panitia Kegiatan Terjemahan Al-Qur'an ke Bahasa Lampung a. Pengarah b. Penanggungjawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000

1	2	3	4
	4. Sekretaris 5. Wakil Sekretaris 6. Bendahara 7. Anggota Sekretariat		Rp. 6.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000
36	Honorarium Imam, Muazin, Imam Sholat Taraweh, Imam Sholat Taraweh Hafiz 30 Juz (pada Masjid Islamic Center) a. Imam b. Muazin c. Imam Sholat Taraweh Safari Romadhon d. Imam Sholat Taraweh Hafiz 30 Juz	O/H O/H O/H O/H	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 300.000 Rp. 500.000
37	Insentif Jasa Pendampingan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	O/K	Rp. 500.000
38	Honor Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah a. Pengarah b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota e. Sekretariat Tim 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000 Rp. 350.000
39	Honorarium Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah a. Pengarah b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota e. Tim Sekretariat 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 750.000 Rp. 700.000 Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 200.000 Rp. 175.000 Rp. 150.000
40	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber /Pengajar/ Penceramah/Pemberi Materi Diklat /Bimtek/Kursus/ Seminar atau Kegiatan Lainnya (Pusat & Provinsi) yang ditetapkan atas dasar SK Bupati a. Eselon I/Pejabat Negara/Dosen Tamu/yang disetarakan b. Eselon II/Guru Besar/Dosen Tamu/yang disetarakan c. Eselon III/ Dosen Tamu/yang disetarakan d. Eselon IV kebawah/ Dosen Tamu/yang disetarakan e. Penceramah Agama 1. Kecamatan 2. Kabupaten 3. Provinsi 4. Nasional f. Moderator g. MC dan Do'a h. Pembaca A- Qur'an	O/J O/J O/J O/J O/J O/K O/K O/K O/K O/materi O/K O/K	Rp. 1.200.000 Rp. 1.000.000 Rp. 800.000 Rp. 600.000 Rp. 1.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 500.000

1	2	3	4
47	Tim Penilai/Juri/Wasit/Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/J O/J O/J	Rp. 75.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000
48	Insentif Tenaga Keagamaan a. Insentif Marbot b. Rohaniawan c. Guru Ngaji d. PPN/Penghulu	O/T O/T O/T O/T	Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
49	Honorarium Tenaga Teknis Terlatih a. Tim Pakar Fraksi DPRD Kabupaten Pringsewu b. Tenaga Ahli Komisi DPRD Kabupaten Pringsewu c. Personil Korsik	O/B O/B O/B	Rp. 2.275.000 Rp. 2.275.000 Rp. 200.000
50	Honorarium Tenaga Teknis Lainnya a. Kader Posyandu b. Penjaga Stand c. Petugas P3K	O/B O/H O/K	Rp. 35.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
51	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	O/K O/K O/K	Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
52	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Pengamanan dan Kamtibmas pada Kecamatan a. Camat sebagai Koordinator b. Danramil/Danposramil dan Kapolsek/Kapospol/Kapolsubsektor sebagai wakil kordinator c. Sekcam sebagai sekretaris d. Kasi Trantib sebagai anggota e. Kanit Bimas, Babinsa dan Babin Kamtibmas f. Kasi, Kasubbag pada Kecamatan sebagai Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 3.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 250.000
53	Honorarium Operator/Admin/Advis a. Operator Mesin Porporasi OPD dan SKRD b. Admin RUP, TEPR, LRFK, c. Operator Komputer dan Admin wibesite pada Dinas/Badan/Kantor/ Satker (1 orang) d. Koordinator dan Operator Komputer Gaji (Sim Gaji), Administrasi Pajak (DTH/RTH), Koordinator/Operator SPD, Administrator Simda pada BPKAD, Operator SIMKESDES, Pengelola Advis Operator Consul PBB/BPHTB, Admin Omspan, Operator Website pada OPD e. Operator E-Planning dan E-Budggeting, JDIH dan SISPENSI PDRD f. Operator Komputer Penatausahaan Keuangan pada satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 200.000

1	2	3	4
	g. Operator Komputer SIMDA-OPD (Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan) h. Operator Sound Sistem Ruang Aula Bupati,Ruang Rapat Sekda,Ruang Rapat Bupati,Apel/Kegiatan Senam,Operator Faxmilie, Absensi Sidik Jari, <i>Sound system</i> , OHP, <i>Runningtext</i> ruang Paripurna pada Sekretariat DPRD	O/B O/B	Rp. 200.000 Rp. 200.000
54	Honorarium Operator pada Dinas Komunikasi dan Informatika a. Web dan Media Sosial b. Operator Sistem Informasi dan Aplikasi c. Operator Data Centre d. Operator Jaringan	O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000
55	Honorarium Non ASN / Tenaga Kontrak SK Bupati a. Petugas Kebersihan b. Tenaga Pengoperasional alat berat/pengemudi c. Penjaga Kantor d. Pol – PP e. Tenaga Pengoperasional SIAK/E-KTP/Pajak f. Pengaman Kehutanan (PAMHUT) g. Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana h. Penjaga Pintu Air/Bendung	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000
56	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari kerja, maka dibayar per bulan (bulanan) a. Pengarah/Pembina b. Penasehat/Penanggunjawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 250.000 Rp. 225.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 175.000 Rp. 150.000
57	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan maksimal 15 hari kerja, maka dibayar per hari (harian) a. Pengarah/Pembina b. Penasehat/Penanggunjawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 100.000 Rp. 80.000 Rp. 75.000 Rp. 65.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000
58	Honorarium Sekretariat Pengawasan Piket pada Pol PP a. Sekretaris b. Anggota	O/B O/B	Rp. 200.000 Rp. 150.000
59	Honorarium Penunjang Pengembangan / Penelitian / Perekayasaan a. Ketua Peneliti b. Koordinator Peneliti	O/B O/B	Rp. 250.000 Rp. 200.000

1	2	3	4
	c. Sekretariat Peneliti d. Pengolahan Data e. Petugas Survey f. Petugas Lapangan g. Pembuat Jurnal Kelitbang	O/B Penelitian Responden O/H Jurnal	Rp. 150.000 Rp. 1.500.000 Rp. 8.000 Rp. 50.000 Rp. 200.000
60	Honorarium Tenaga Medis dan Paramedis sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT a. Dokter PTT b. Perawat PTT c. Bidan PTT d. Tenaga Kesehatan Lainnya e. Intersip Dokter PTT	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000
61	Honor Pengelola Obat/Vaksin a. Pengelola Obat Instalasi Farmasi Dinas b. Pengelola Obat Gudang Puskesmas c. Pengelola Vaksin Dinas d. Pengelola Vaksin Puskesmas e. Staf Pengelola Instalasi Farmasi Dinas Non ASN	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000
62	Honorarium Pengawas Pendidikan a. Honorarium Pengawas TK b. Honorarium Pengawas SD c. Honorarium Pengawas Rumpun d. Honorarium Pengawas Pendidikan Agama Islam e. Honorarium Pengawas Pendidikan Masyarakat	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000
63	Honorarium Non ASN bagi Pendidik dan Non Pendidik a. Honorarium Pendidik b. Honorarium Non – Pendidik	O/B O/B	Rp. 150.000 Rp. 150.000
64	Honor Pendamping, Operator dan koordinator PKH/BNPT a. Pendamping dan Operator dan Koordinator PKH/BNPT b. Tim Koordinasi PKH/BNPT 1. Pengarah 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota c. Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH/BNPT d. Petugas Keamanan Penyaluran Bantuan PKH/BNPT	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 200.000
65	Honor Tagana dan Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i> a. Tagana b. Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i>	O/B O/B	Rp. 200.000 Rp. 200.000
66	Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	O/B O/B	Rp. 300.000 Rp. 250.000

1	2	3	4
67	Honor Pengurus dan Tim Profesi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) a. Pengurus LK3 1. Penanggungjawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota b. Tim Profesi LK3 1. Pekerja Sosial 2. Psikolog 3. Polisi 4. Advokad 5. Tenaga Konselor 6. Tenaga Kesehatan	 O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000
68	Honor Petugas Pendata PMKS dan PSKS a. Honor Tenaga Input Data Base PMKS 1. Operator Data Base PMKS 2. Koordinator Wilayah Kecamatan 3. Petugas Pendataan PMKS dan PSKS b. Honor Petugas Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan	 O/B O/B O/B O/K	 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 600.000
69	Honor Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, Asistensi Sosial Lanjut Usia, KUBE dan Pendamping Program KS (Pusat) a. Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas b. Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia c. Pendamping KUBE d. Pendamping Program KS	 O/B O/B O/B O/B	 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000
70	Honor Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) a. Tenaga Ahli (Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan) b. Tenaga dari Instansi lainnya	 O/B O/B	 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000
71	Honorarium Pengelola Radio Pemerintah Daerah a. Dewan Pengawas 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota b. Dewan Direksi 1. Direktur Utama 2. Direktur Teknis 3. Direktur Pemberitaan c. Penanggungjawab Penyelenggara Siaran 1. Pelaksana Program Siaran 2. Pelaksana Pembawa Berita 3. Pelaksana Teknis Studio Radio 4. Pelaksana Teknis Pemancar Radio	 O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	 Rp. 1.000.000 Rp. 900.000 Rp. 900.000 Rp. 900.000 Rp. 800.000 Rp. 800.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000

1	2	3	4
	5. Pelaksana Teknis kebersihan 6. Pelaksana Teknis keamanan	O/B O/B	Rp. 750.000 Rp. 750.000
72	a. Tunjangan Khusus Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2. Jabatan Administrator 3. Jabatan Pengawas 4. Jabatan Pelaksana/Staf 5. Tenaga Kontrak b. Tunjangan Khusus/Insentif Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1. Penanggungjawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Staf Sekretariat	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B Rekom O/B	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 1.000.000 Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 200.000 Rp. 350.000
73	Honorarium Tim Pembina Alokasi Dana Pekon a. Ketua b. Wakil Ketua/Koordinator c. Sekretaris d. Anggota pada OPD e. Anggota pada Kecamatan	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.750.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000
74	Honorarium Tim Penyusunan Analisis Standar Biaya a. Pengarah b. Penanggungjawab c. Ketua d. Wakil Ketua I e. Wakil Ketua II f. Sekretaris g. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.150.000 Rp. 1.100.000 Rp. 1.000.000 Rp. 850.000 Rp. 750.000
75	Honorarium Pengurus Inti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III e. Sekretaris f. Bendahara g. Wakil Sekretaris h. Wakil Bendahara i. Ketua Pokja I, II, III, IV	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 600.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000
76	Honorarium Pengurus Inti Tim Dharma Wanita a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Bendahara h. Wakil Bendahara i. Anggota Pengurus Darma Wanita	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.000.000 Rp. 550.000 Rp. 450.000 Rp. 450.000 Rp. 350.000 Rp. 200.000 Rp. 350.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000

1	2	3	4
77	Honorarium Tim Pengurus Dekranasda dan Penjaga Galeri		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Wakil Ketua I	O/B	Rp. 750.000
	c. Wakil Ketua II	O/B	Rp. 750.000
	d. Sekretaris	O/B	Rp. 600.000
	e. Wakil Sekretaris	O/B	Rp. 500.000
	f. Bendahara	O/B	Rp. 600.000
	g. Wakil Bendahara	O/B	Rp. 500.000
	h. Penjaga Galeri Dekranasda	O/B	Rp. 1.000.000
78	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli/Beracara	O/K	Rp. 1.800.000

C. Honorarium Pelaksana Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) sebagai berikut:

1. Honorarium Admin Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Admin PPE	O/B	Rp. 1.250.000
2	Admin System	O/B	Rp. 1.250.000
3	Admin Agency	O/B	Rp. 1.250.000
4	Verifikator	O/B	Rp. 1.250.000
5	Help Desk	O/B	Rp. 1.250.000
6	Advokasi/Training	O/B	Rp. 1.250.000
7	Monev dan Pengembangan	O/B	Rp. 1.250.000
8	Tata Usaha	O/B	Rp. 1.000.000

2. Honorarium Pejabat Pengadaan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pejabat Pengadaan	O/B	Rp. 1.750.000

3. Honorarium Majelis Pertimbangan Komite Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Ketua	O/B	Rp. 1.500.000
2	Sekretaris	O/B	Rp. 1.250.000
3	Anggota	O/B	Rp. 1.000.000

4. Honorarium Sekretariat Komite Etik

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Ketua	O/B	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris	O/B	Rp. 750.000
3	Anggota	O/B	Rp. 500.000

5. Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Ketua Tim	O/B	Rp. 500.000
2	Tenaga Pendukung	O/B	Rp. 300.000

D. Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/ Konstruksi		
	a. Pagu s.d 200 juta	O/B	Rp. 250.000
	b. Pagu > 200 juta s.d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
	c. Pagu > 500 juta s.d 1 M	O/B	Rp. 350.000
	d. Pagu > 1M s.d 2,5 M	O/B	Rp. 450.000
	e. Pagu diatas 2,5 M	O/B	Rp. 500.000
2	Anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Pagu s.d 50 juta	O/B	Rp. 200.000
	b. Pagu > 50 juta s.d 200 juta	O/B	Rp. 300.000
	c. Pagu > 200 juta s.d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
	d. Pagu > 500 juta s.d 1 M	O/B	Rp. 500.000
	e. Pagu diatas 1 M	O/B	Rp. 600.000

E. Honorarium Tim/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt		
	a. Ketua	O/P	Rp. 200.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 175.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 150.000
3	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M		
	a. Ketua	O/P	Rp. 250.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 225.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 200.000
4	Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M		
	a. Ketua	O/P	Rp. 300.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 275.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 250.000
5	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 2,5 M		
	a. Ketua	O/P	Rp. 350.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 300.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 275.000

F. Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Biaya Paket Pemeriksaan Khusus a. Biaya Proses Pengumpulan Data b. Biaya Transportasi Tim ke Lokasi c. Uang Lembur Tim d. Biaya Penyusunan Laporan	Paket	Rp. 3.000.000

G. Honorarium Panitia dan Sekretariat Seleksi Pengisian dan Mutasi JPT Pratama

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	a. Honorarium Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	O/K O/K O/K	Rp. 14.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 10.000.000
	b. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi JPT Pratama 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Sekretaris	O/K O/K O/K	Rp. 5.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 4.000.000
	c. Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 4. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B	Rp. 4.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 500.000

H. Honorarium Tim dan Sekretariat Baperjakat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Tim Baperjakat a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000
2	Honorarium Sekretariat Baperjakat a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota d. Anggota Non PNS	O/B O/B O/B O/B	Rp. 750.000 Rp. 650.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000

I. Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat a. Honor Mentor Diklat PIM II b. Honor Mentor Diklat PIM III c. Honor Mentor Diklat PIM IV d. Honor Mentor Prajabatan	O/K O/K O/K O/K	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000

J. Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV		
	a. <i>Lession Officer</i>	O/K	Rp. 1.000.000
	b. Evaluasi Penyelenggaraan	O/K	Rp. 1.500.000

K. Uang Lembur, Uang Piket dan Uang Makan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Uang Lembur (Lembur Maksimal 30 jam kerja/orang per 1 bulan, maksimal per hari 3 jam)		
	a. Golongan IV	O/J	Rp. 17.000
	b. Golongan III	O/J	Rp. 15.000
	c. Golongan II	O/J	Rp. 12.000
	d. Golongan I	O/J	Rp. 10.000
	e. Non PNS	O/J	Rp. 9.000
2.	Uang Makan Lembur sebesar Rp. 25.000,-/org (diberikan kepada semua golongan secara berturut-turut minimal 3 Jam Lembur dan diberikan maksimal 1 kali per hari)	O/K	Rp. 25.000

II. Biaya Pendidikan dan Beasiswa

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan diberikan uang saku selama pendidikan:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Diklat PIM		
	a. Diklat Penjenjangan PIM II	O/K	Rp. 10.000.000
	b. Diklat Penjenjangan PIM III	O/K	Rp. 5.000.000
	c. Diklat Penjenjangan PIM IV	O/K	Rp. 2.000.000

- b. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek/ <i>Workshop</i> /Loka Karya dan sejenisnya:		
	a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku dan Bantuan Transport Peserta	O/H	Rp. 50.000
	b. Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):	O/H	X
	1. Biaya Kontribusi		
	2. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas)	O/H	X
	c. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:		
	1. Biaya Kontribusi	Org/Agkt	Rp. 5.000.000
	2. Uang Saku dan Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas)	Org/Agkt	X

Ket : X = sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara.

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar ASN yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat, Pelaksana, Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	<p>Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3</p> <p>a. Dalam Negeri:</p> <p>1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda</p> <p>b. Luar Negeri/<i>Double Degree</i></p> <p>1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda</p> <p>3. Bantuan Administrasi Keimigrasian</p> <p>Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.</p>	<p>O/B</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p>	<p>Rp. 900.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 2.000.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p>
2.	<p>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1</p> <p>a. Dalam Negeri:</p> <p>1. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan</p> <p>2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda</p> <p>b. Luar Negeri/<i>Double Degree</i></p> <p>1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda</p> <p>3. Bantuan Administrasi Keimigrasian</p> <p>Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.</p>	<p>O/B</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p>	<p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p>
3.	<p>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2</p> <p>a. Dalam Negeri:</p> <p>1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda</p> <p>3. Bantuan Biaya Pendampingan beasiswa pendidikan bagi dokter umum/dokter gigi untuk melanjutkan ke dokter spesialis</p> <p>b. Luar Negeri/<i>Double Degree</i></p> <p>1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda</p> <p>3. Bantuan Administrasi Keimigrasian</p> <p>Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.</p>	<p>O/B</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>O/B</p>	<p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p>

- d. Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi ASN yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Dalam Negeri	O/B	Rp. 1.000.000
2.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Luar Negeri	O/B	Rp. 2.500.000

- e. Biaya Pendidikan Calon Peserta Diklat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Biaya Kontribusi Peserta	O/B	Rp. 39.500.000

III. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Telepon	U/B	Disesuaikan dengan tagihan rekening	Seluruh OPD
2.	Belanja Listrik	U/B		
3.	Biaya Air / PAM	U/B		
4.	Belanja Kawat/Faximile/Internet	U/B		
5.	Belanja Alat Tulis Kantor			Untuk kegiatan Diklat, Bimtek, Wokshop, Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya menyesuaikan dengan jumlah peserta dan kebutuhan
a.	Pagu anggaran s/d 100 juta	/Kegiatan	Rp. 750.000	
b.	Pagu anggaran 100 s/d 300 juta	/Kegiatan	Rp. 1.500.000	
c.	Pagu anggaran 300 s/d 500 juta	/Kegiatan	Rp. 2.000.000	
d.	Pagu anggaran 500 juta s/d 1 miliar	/Kegiatan	Rp. 2.500.000	
e.	Pagu anggaran diatas 1 miliar	/Kegiatan	Rp. 3.500.000	
6.	Belanja Dokumentasi dan Pameran (Khusus Pengisian Materi): HUT Kabupaten Pringsewu	Paket	Rp. 30.000.000	Termasuk kendaraan hias
7.	Belanja Makan Minum Kegiatan			
a.	Makan Minum Rumah Tangga			
1.	Bupati	U/B	Rp. 35.000.000	
2.	Wakil Bupati	U/B	Rp. 30.000.000	
b.	Jamuan Makan (Nasi Kotak)	O/Kotak	Rp. 25.000	
c.	Jamuan Makan VVIP (Pusat & Provinsi)	O/Porsi	Rp. 100.000	
d.	Jamuan Makan VIP	O/Porsi	Rp. 75.000	

1	2	3	4	5
	e. Jamuan Makan Prasmanan (Masyarakat Umum/Peserta Kegiatan)	O/Porsi	Rp. 70.000	
	f. Jamuan Makan Tamu VVIP (Pusat dan Provinsi) di hotel	O/Porsi	Rp. 200.000	
	g. Makan Minum Tamu DPRD			
	1. Ketua	O/B	Rp. 3.500.000	
	2. Wakil ketua I	O/B	Rp. 3.000.000	
	3. Wakil Ketua II	O/B	Rp. 3.000.000	
	h. Snack Tamu VVIP (Pusat & Prov)	O/Porsi	Rp. 75.000	
	i. Snack Tamu VIP	O/Porsi	Rp. 60.000	
	j. Buah VVIP (Pusat & Prov)	O/Porsi	Rp. 60.000	
	k. Buah VIP	O/Porsi	Rp. 50.000	
	l. Snack	O/Kotak	Rp. 12.000	
8	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Badan/Dinas/Kantor	U/T	Rp. 10.000.000	
9	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas:			
	a. Bupati	U/T	Rp. 80.000.000	
	b. Wakil Bupati	U/T	Rp. 75.000.000	
10	Biaya Pemeliharaan Pendopo/ Anjungan/Masjid Pemda	U/Paket	Rp. 100.000.000	
11	Biaya Pemeliharaan Gedung DPRD	U/T	Rp. 60.000.000	
12	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Gudang / Tempat			
	a. Gedung/kantor/ruang kerja	U/T	Rp. 30.000.000	
	b. Tempat Penyimpanan/Gudang	U/T	Rp. 15.000.000	
13	Biaya Sewa Rumah Dinas:			
	a. Bupati	U/T	Rp. 80.000.000	
	b. Wakil Bupati	U/T	Rp. 75.000.000	
	c. Sekretaris Daerah	U/T	Rp. 65.000.000	
14	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Ruangan/Ruang Rapat/ Pertemuan Catatan: Sewa gedung pertemuan sudah termasuk peralatan dan perlengkapan pertemuan (meja, kursi, sound system, dll), biaya kebersihan dan pengamanan.	U/H	Rp. 3.000.000	
15	Sewa Papan Bunga			
	a. Sewa Papan Bunga Sedang	Unit	Rp. 350.000	
	b. Sewa Papan Bunga Besar	Unit	Rp. 700.000	
16	Sewa Pakaian Adat untuk Tamu Pemda	Set/Hari	Rp. 500.000	

1	2	3	4	5
17	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
	a. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 Besar (termasuk BBM dan Supir)	U/H	Rp. 3.500.000	Sewa Kendaraan untuk Luar Provinsi disesuaikan dengan Harga <i>Real</i>
	b. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 Sedang	U/H	Rp. 2.300.000	
	c. Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk	U/H	Rp. 1.500.000	
	d. Kendaraan Bermotor Roda 4	U/H	Rp. 500.000	
	e. Kendaraan Bermotor Roda 2	U/H	Rp. 50.000	
18	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat Daerah /Badan / Dinas / Sekwan / Bagian / Camat dan Komisi			
	a. Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang:			
	1. Mobil Minibus (1000-1500cc)	U/T	Rp. 4.000.000	
	2. Mobil Minibus diatas 1500cc	U/T	Rp. 5.000.000	
	3. Mobil Bus ¾, Truk	U/T	Rp. 5.800.000	
	4. Bus Roda Enam	U/T	Rp. 8.500.000	
	5. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 750.000	
	6. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/T	Rp. 1.250.000	
	b. Biaya Servis			
	1. Mobil Minibus (1000-1500cc)	U/T	Rp. 2.000.000	
	2. Mobil Minibus (1000-1500cc)	U/T	Rp. 2.000.000	
	3. Mobil Minibus diatas 1500cc	U/T	Rp. 2.000.000	
	4. Mobil Bus ¾, Truk	U/T	Rp. 2.500.000	
	5. Bus Roda Enam	U/T	Rp. 3.000.000	
	6. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 500.000	
	7. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/T	Rp. 700.000	
	c. Biaya Pembelian BBM			
	1. Mobil Minibus/Pick up/Bus	U/B	Rp. 2.000.000	
	2. Mobil Truk Sampah	U/B	Rp. 2.500.000	
	3. Mobil Pengawalan	U/B	Rp. 3.000.000	
	4. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/B	Rp. 500.000	
	d. Biaya Pembelian Pelumas			
	1. Mobil Minibus (1000-1500cc)	U/B	Rp. 400.000	
	2. Mobil Minibus diatas 1500cc	U/B	Rp. 600.000	
	3. Mobil diatas 2400cc	U/B	Rp. 1.000.000	
	4. Mobil Bus,Truk	U/B	Rp. 600.000	
	5. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/B	Rp. 50.000	
	e. Pembelian Accu			
	1. Mobil Minibus, Jeep	U/T	Rp. 1.000.000	

1	2	3	4	5
	2. Mobil Bus, Truk 3. Mobil Bus Roda Enam 70 N 4. Mobil Bus Roda Enam 100 N 5. Sepeda Motor Roda dua 6. Sepeda Motor/Roda Tiga f. Bantuan Pembelian Ban 1. Mobil Minibus (1000-1500cc) 2. Mobil Minibus diatas 1500cc 3. Mobil Bus,Truk 4. Mobil Bus Roda Enam 5. Sepeda Motor Roda dua 6. Sepeda Motor Roda Tiga	U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T	Rp. 1.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 4.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 8.000.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000	
19	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Pimpinan DPRD a. Bupati /Wakil Bupati 1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang 2. Biaya Service 3. Biaya Pembelian BBM/Premix 4. Biaya Pembelian Pelumas 5. Pembelian Accu 6. Pembelian Ban b. Sekretaris Daerah 1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang 2. Biaya Service 3. Biaya Pembelian BBM/Premix 4. Biaya Pembelian Pelumas 5. Pembelian Accu 6. Pembelian Ban c. DPRD (Mobil Ketua/Wakil Ketua) 1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang 2. Biaya Service 3. Biaya Pembelian BBM/Premix 4. Biaya Pembelian Pelumas 5. Pembelian Accu 6. Pembelian Ban	U/T U/T U/B U/B U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/B U/B U/B U/T U/T U/B U/B U/T U/T	Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 10.000.000	
20	Belanja Jasa Kir Kendaraan Dinas/Operasional	U/T	Rp. 250.000	

1	2	3	4	5
21	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): a. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati 1. Kendaraan Dinas Bupati 2. Kendaraan Dinas Wakil Bupati b. Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kendaraan roda 6 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 3 4. Kendaraan roda 2	 U/T U/T U/T U/T U/T U/T	 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	
22	Belanja Sewa Alat Berat a. Belanja Sewa Eskavator b. Belanja Sewa Buldoser	 U/J U/J	 Rp. 500.000 Rp. 500.000	
23	Biaya Asuransi Kendaraan Dinas a. Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD b. Kendaraan Dinas OPD c. Klaim Asuransi Kendaraan Dinas Per Panel	 U/T U/T U/Panel	 Rp. 9.750.000 Rp. 6.500.000 Rp. 350.000	
24	Belanja Sewa Meja dan Kursi a. Sewa Meja (Penerima Tamu) b. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar) c. Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP) d. Sewa Sarung Kursi e. Sewa Meja VIP	 U/K U/K U/K U/K U/K	 Rp. 60.000 Rp. 5.000 Rp. 50.000 Rp. 4.000 Rp. 125.000	
25	Belanja Sewa Generator a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Silent</i>) b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Biasa</i>) c. Sewa Genset 30 KVA d. Sewa Genset 40 KVA e. Sewa Genset 50 KVA f. Sewa Genset 100 KVA	 U/H U/H U/H U/H U/H U/H	 Rp. 3.200.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.750.000 Rp. 4.000.000 Rp. 5.500.000	
26	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda	U/H	Rp. 250.000	
27	Belanja pada Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai dan Putri Otonomi a. Belanja Tata Rias b. Sewa Baju Adat Muli c. Sewa Baju Adat Mekhanai d. Juri Muli Mekhanai	 O/K Set/Kgt Set/Kgt O/Kgt	 Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 250.000 Rp. 1.500.000	

1	2	3	4	5
	e. MC Muli Mekhanai	O/Kgt	Rp. 1.000.000	
	f. Uang Saku Penari	O/Kgt	Rp. 100.000	
	g. Uang Saku Pemusik	O/Kgt	Rp. 100.000	
28	Belanja Sewa Perlengkapan/ Dekorasi			
	a. Sewa Panggung ukuran 12m x 10m	Set/Hari	Rp. 8.400.000	
	b. Sewa <i>Lighting</i> (Tata Cahaya) <i>Lighting</i>	Set/Hari	Rp. 6.750.000	
	c. Sewa Sound System (Tata Suara)			
	1. Sound System Kekuatan 5.000 w	Set/Hari	Rp. 3.000.000	
	2. Sound System Kekuatan 10.000w	Set/Hari	Rp. 6.800.000	
	3. Sound System Kekuatan 20.000w	Set/Hari	Rp. 11.500.000	
	4. Sound System Kekuatan 30.000w	Set/Hari	Rp. 17.500.000	
	d. Sewa Karpet Ukuran 6 m x 8 m Karpet	M/Hari	Rp. 30.000	
	e. Sewa Dekorasi Taman Dekorasi Taman	Set/Hari	Rp. 3.500.000	
29	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya			
	a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati, Wakil Bupati, Sekda/DPRD dan ASN			
	1. Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 1.750.000	
	2. Pakaian Dinas DPRD, Sekda	/stel	Rp. 1.600.000	
	3. Eselon II	/stel	Rp. 1.000.000	
	4. Eselon III	/stel	Rp. 750.000	
	5. Eselon IV dan Staf	/stel	Rp. 500.000	
	6. Staf Pakaian Pol PP dan Pemadam Kebakaran	/stel	Rp. 500.000	
	7. Pakaian Khusus Protokol	/stel	Rp. 500.000	
	b. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	1. PSH Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.000.000	
	2. PSH DPRD, Sekda	/stel	Rp. 2.500.000	
	c. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
	1. PSL Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.750.000	
	2. PSL DPRD, Sekda	/stel	Rp. 3.500.000	
	d. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.750.000	

1	2	3	4	5
	e. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			
	1. PSR Bupati, Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.500.000	
	2. PSR DPRD, Sekda	/stel	Rp. 3.000.000	
	f. Belanja Pakaian Adat			
	1. Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.500.000	
	2. DPRD, Sekda	/stel	Rp. 3.000.000	
30	Belanja Pakaian Hari-hari/Khusus (Batik Kegiatan MTQ, HUT Kabupaten dan kegiatan lainnya minimal Tingkat Provinsi dan HUT Provinsi)			
	a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD	/stel	Rp. 1.000.000	
	b. Anggota DPRD, Sekda	/stel	Rp. 750.000	
	c. Asisten dan Eselon II	/stel	Rp. 500.000	
	d. Eselon III	/stel	Rp. 400.000	
	e. Eselon IV dan Staf	/stel	Rp. 300.000	

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI